

**IDENTIFIKASI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN  
KEPULAUAN SANGIHE MENUJU PEMEKARAN WILAYAH**

*Reyne Ivone Radangkilat*

*Joyce J. Rares*

*Burhanuddin. Kiyai*

**ABSTRACT**

*This study describes how the contribution of the Locally-Generated Revenue (LGR) sources of Sangihe Islands Regency to the total LGR and the effectiveness level of the acceptance of the LGR sources in Sangihe Islands Regency.*

*The method used in this research is descriptive qualitative method with secondary data obtained from the Department of Financial Revenue Management and Local Asset of Sangihe Islands Regency. Data collection techniques are documentation study and literature study with contribution analysis techniques and level of effectiveness.*

*The results of data analysis show that the average value of the contribution of the revenue sources (Local Taxes, Local Levies, Local Resources Management, and Miscellaneous Legal Revenue) of Sangihe Islands Regency in the fiscal year of 2009-2013 was respectively 11.73 %, 50.93 %, 5.36 %, and 31.92 %; and the average value of the effectiveness level of the LGR acceptance of Sangihe Islands Regency in the fiscal year of 2009-2013 was 89.26%, or already effective.*

*Based on the results of this study, it can be concluded that the Local Levies sources provide the largest contribution to the total LGR in the fiscal year of 2009-2013, followed by Miscellaneous Legal Revenue, Local Taxes, and Separated Local Resources Management. In terms of the level of effectiveness, the administration of revenue sources of LGR in the fiscal year of 2009-2013 has been effective. However, there are several factors inhibiting the increase in the LGR of Sangihe Islands Regency; among others, human resources (HR), supervision, and coordination.*

*This study then suggests that the LGR of Sangihe Talaud be increased, the performance of SKPD needs to be optimized to generate LGR, and some of the factors inhibiting the increase in LGR needs serious attention from the government.*

**Key word : Locally-Generated Revenue (LGR), Regional Divisions**

## **PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah bagian daerah yang bersandingan atau penggabungan beberapa daerah. Pembentukan daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan yang dikatakan otonomi daerahnya, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud.

Pamudji (1980) yang menyatakan, bahwa pemerintahan daerah tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Jadi, Agar daerah dapat membiayai segala aktivitasnya, maka diperlukan sumber-sumber keuangan. Sumber – sumber keuangan menurut

Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 terdiri atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain – lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang murni dari daerah yang merupakan modal utama bagi daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Santoso:1995). Pendapatan Asli Daerah meskipun diharapkan dapat menjadi modal utama bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, pada saat ini kondisinya masih kurang memadai. Dalam arti bahwa proporsi yang dapat disumbangkan PAD terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) masih relatif rendah. Sebagaimana yang dialami Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, selama kurun waktu tahun anggaran 2009 -2013 proporsi PAD terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 5,14 %. Sedangkan proporsi dana perimbangan terhadap Total Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 81,94 %. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi dan tingkat

efektifitas administrasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka dari penjelasan latarbelakang di atas maka penulis mengambil penelitian ini dengan judul : ***(PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe. identifikasi pendapatan asli daerah (pad) kabupaten kepulauan sangihe menuju pemekaran wilayah***

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu menentukan hipotesisnya (Arikunto, 2002).

Konsep yang menjadi fokus penelitian ini, identifikasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe menuju pemekaran wilayah dengan data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe. Data yang digunakan tersebut bersifat runtut waktu (*time series*)

selama 5 (lima) tahun dari tahun anggaran 2009 sampai dengan tahun anggaran 2013.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi dan studi kepustakaan/literatur dengan teknik analisis kontribusi dan tingkat efektifitas.

1. Analisis kontribusi dimaksud untuk mengetahui besarnya kontribusi masing-masing sumber PAD terhadap total PAD. Maka digunakan formulasi sebagai berikut (Widodo, 1990):

$$\frac{\text{KSP}}{\text{TSP}} \times 100\%$$

Diketahui : KKSP adalah kontribusi komponen sumber penerimaan

KSP adalah besaran komponen sumber penerimaan

TSP adalah besaran total sumber penerimaan

2. Analisis Efektifitas untuk mengukur kinerja administrasi penerimaan

PAD menggunakan ukuran tingkat efektifitas. Analisis ini digunakan untuk mengetahui keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan presentase perbandingan antara realisasi penerimaan dan target penerimaan yang ditetapkan sebelumnya. Dengan perhitungan tersebut, maka angka yang diperoleh akan memiliki makna bahwa semakin kecil angka efektifitasnya berarti semakin tidak efektif. Sebaliknya semakin besar angka efektifitasnya berarti semakin efektif, yang menggambarkan semakin baik kinerja administrasi penerimaan PAD-nya.

Efektif tidaknya penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat diketahui dengan membandingkan nilai efektifitas yang diperoleh dengan standar yang ditetapkan Depdagri, yaitu : 40,10 % - 60,00 % berarti tidak efektif, 60,10 % - 80,00 % berarti cukup efektif, 80,10 % - 100,00

% berarti efektif, dan lebih dari 100,00 % sangat efektif.

Bila diformulasi dalam rumus adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Efektifitas}}{\text{Target Penerimaan}} \times 100\%$$

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Secara umum, sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe mengalami kenaikan yang cukup signifikan setiap tahunnya mulai tahun 2009 – 2013 walaupun pungutan dari retribusi daerah mengalami penurunan pada tahun 2010, kemudian tahun 2012-2013, lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan. Penurunan

realisasi pendapatan 2 (dua) komponen PAD tersebut diimbangi dengan meningkatnya dari 2 (dua) komponen PAD lainnya, yaitu pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

### **1. Kontribusi Sumber-Sumber PAD**

Hasil analisis kontribusi sumber-sumber PAD terhadap total PAD cukup menjelaskan bahwa yang paling besar perannya dalam menyumbang PAD sejak tahun anggaran 2009-2013 adalah retribusi daerah, seterusnya diikuti oleh penerimaan lain-lain, pajak daerah dan selanjutnya hasil pengelolaan kekayaan daerah. Masing-masing memberikan kontribusi rata-rata sebesar 50,93 %, 31,92 %, 11,73 % dan 5,36 %. Kontribusi pajak daerah yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan terbesar selain retribusi daerah, ternyata belum bias diandalkan. Hal ini disebabkan kontribusi rata-rata pajjak daerah hanya 11,73 %. Sementara itu untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah, besarnya nilai kontribusi diikuti dengan nilai absolutnya. Meskipun nilai kontribusinya terkecil disbanding

sumber penerimaan lainnya, akan tetapi setiap tahun kontribusinya mengalami peningkatan. Peningkatan ini bias disebabkan karena volume usaha dari BUMD, yaitu Bank SULUT yang terus meningkat.

### **2. Tingkat Efektifitas PAD**

Tingkat efektifitas penerimaan PAD Kabupaten Kepulauan Sangihe dari tahun 2009 sampai tahun 2013 yang mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2009 dari total yang ditargetkan sebesar Rp. 35.511.041.479,25 dan terealisasi hanya sebesar Rp. 29.944.684.952,54 atau 84,32 persen menjadi 80,01 persen pada tahun 2010. Pada tahun 2011 kembali meningkat 96,96 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp. 29.397.292.263,00, terealisasi sebesar Rp. 28.506.013.460,69. Kemudian pada tahun 2012 menurun 5,11 persen dari yang terealisasi pada tahun 2011 yaitu menjadi 91,85 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp. 30.468.830.988,00. Selanjutnya kembali meningkat 1,35 persen pada tahun 2013

dengan total realisasi sebesar Rp. 32.264.319.523,39. Sehingga pada tahun 2013 tingkat efektifitas yang dicapai adalah 93,20 persen dari total yang ditargetkan pada tahun tersebut sebesar Rp. 34.620.154.464,48, Meskipun capaian anggaran yang terealisasi dari tahun 2009 sampai 2013 tidak pernah mencapai target yang ditetapkan, maka berdasarkan perhitungan tingkat efektifitas diatas, nilai rata-rata efektifitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebesar 89,26 persen. Dengan demikian kinerja administrasi penerimaan PAD Kabupaten Sangihe sudah efektif dari tahun 2009-2013. Hal ini membuktikan, bahwa pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe mampu dan terus berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **3. Faktor Yang Menghambat Peningkatan PAD**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, ditemui beberapa kendala diantaranya sebagai berikut :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu kemampuan dan keterampilan dalam mengelola sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih sangat terbatas. Sehingga banyak target yang tidak tercapai.
2. Faktor Pengawasan, yaitu sistem pengawasan dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dari pihak terkait belum optimal. Sehingga banyak SKPD yang tidak mencapai target dan bila dicermati masih ada SKPD yang belum memberikan laporan kontribusi pendapatan yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan.
3. Faktor Koordinasi yang belum berjalan dengan baik.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa

1. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe terdiri atas Pajak Daerah,

Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah.

2. Berdasarkan hasil analisis kontribusi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada tahun pada tahun anggaran 2009-2013, sumber penerimaan Retribusi Daerah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian diikuti sumber Lain-Lain PAD yang Sah, Pajak Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.
3. Berdasarkan hasil analisis efektifitas, kinerja administrasi penerimaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2009-2013, sudah efektif.
4. Faktor-faktor yang menghambat meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe antara lain, faktor sumber daya manusia (SDM), pengawasan dan faktor koordinasi.

#### **A. Saran**

Berdasarkan kekurangan yang dihadapi dalam penelitian ini, beberapa saran yang perlu diperhatikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kepulauan Sangihe perlu ditingkatkan lagi, dengan cara menggali sumber-sumber PAD dan memanfaatkan potensi-potensi daerah yang ada.
2. Kinerja SKPD perlu dioptimalkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sebab masih banyak SKPD yang realisasi pendapatannya tidak tercapai target.
3. Faktor-faktor penghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, S, 2002, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Pamudji, S, 1980, *Pembinaan Perkembangan Perkotaan diIndonesia, Tinjauan dari*

*Aspek Administrasi*  
*Pemerintahan*, Jakarta : Ichtiar  
Baruj Van Hoeve.

Santoso, 1995.*Sumber-Sumber*  
*Pendapatan Asli Daerah*,  
Yogyakarta, UII

Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun  
2007 tentang Tata cara  
Pembentukan, Penghapusan dan  
Penggabungan Daerah